

## PPATK Ungkap Transaksi Mencurigakan Libatkan Banggar

JAKARTA – Bau busuk merebak dari Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ini terkait dengan surat rahasia Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada pimpinan DPR yang membeberkan 21 transaksi mencurigakan yang dilakukan anggota Banggar DPR.

Surat rahasia PPTAK yang diungkap Wakil Ketua DPR Pramono Anung dan Priyo Budi Santoso seolah membenarkan kasak-kusuk yang sudah lama merebak tentang ada keterlibatan anggota Banggar dalam praktik mafia anggaran. "PPATK menyampaikan surat kepada pimpinan DPR bahwa sekarang ini sedang ditelusuri 21 transaksi mencurigakan

yang melibatkan anggota Banggar," kata Wakil Ketua DPR saat diskusi dengan wartawan di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Dia pun berharap PPATK bisa mengungkapkan lebih jauh indikasi awal keberadaan transaksi mencurigakan anggota Banggar. Dengan demikian, kasus ini bisa diteruskan ke penegak hukum. Mantan Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga menggariskan, karena data awalnya sudah masuk ke DPR, PPATK dituntut bisa mengungkap siapa aktor yang terlibat dalam mafia anggaran itu.

"PPATK harus telusuri lagi agar datanya lebih kredibel dan bisa melacak adanya kongkalikong mafia anggaran."

Ke Hal 15))



Wakil Ketua DPR Pramono Anung (kiri) dan Priyo Budi Santoso (kanan) saat hadir dalam Dialog Jumat di kompleks DPR, Jakarta, kemarin. Mereka mengungkap surat rahasia PPATK tentang 21 transaksi mencurigakan yang melibatkan Badan Anggaran DPR.

# PPATK Ungkap Transaksi Mencurigikan Libatkan Banggar

((dari Hal 1

"Yaitu antara pihak pemerintah, kontraktor yang biasanya disertai broker, dan orang yang ada di Banggar," ujar Pramono.

PPATK dalam suratnya secara gamblang menyebut transaksinya. Namun, pimpinan DPR tidak bersedia menyebut transaksi apa saja dan siapa anggota Banggar yang terlibat. Secara etika maupun UU PPATK data itu memang dirahasiakan, kecuali untuk proses hukum.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso juga menandakan, meski apa yang disampaikan PPATK sudah sangat gamblang, DPR tidak dalam kapasitas dan tidak etis untuk menyampaikan transaksi apa saja dan oleh siapa. Priyo juga enggan menyebutkan inisial maupun dari partai mana anggota Banggar tersebut. "Kita hanya bisa sampaikan bahwa DPR sangat mengapresiasi PPATK atas suratnya mengenai dugaan transaksi mencurigikan oleh oknum dari Banggar," katanya.

Kepala PPATK Yunus Husainsaat dikonfirmasi menolak mengungkapkan transaksi mencurigikan apa saja dan siapa saja anggota Banggar DPR yang terlibat. Dia hanya membenarkan bahwa pihaknya telah memberikan surat ke DPR terkait persoalan tersebut. Penjelasan PPATK terhadap DPR itu atas permintaan dan sudah sesuai dengan UU. "Dasar pemberian karena ada permintaan berdasarkan penjelasan Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 90 UU Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)," ungkapnya.

Wakil Ketua KPK M. Jasim berjanji akan menindaklanjuti temuan tersebut jika data PPATK tersebut disampaikan ke KPK. "Saya tidak bisa menyampaikan banyak soal ini karena ini kan data intelijen. Pastinya kami akan tindak lanjut temuan PPATK ini. Saya pastikan juga PPATK diminta atau tidak diminta hasil analisisnya pasti disampaikan ke KPK," kata Jasim.

## DPR Undang KPK dan BPK

Terkait terkuaknya indikasi keterlibatan anggota Banggar dalam praktik mafia anggaran, pimpinan DPR berjanji mendorong PPATK agar bisa lebih proaktif ikut menciptakan iklim yang transparan dalam pengelolaan negara ini. Pramono bahkan mengaku pihaknya telah membuat keputusan bahwa semua rapat anggaran di Banggar akan mengundang secara resmi KPK dan BPK untuk memantau langsung.

"KPK akan secara resmi untuk hadir setiap rapat penyusunan anggaran di Banggar. Ini yang menjadi perhatian khusus dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan publik yang berkembang mengenai Banggar," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

KPK kemarin untuk kali kelima mendatangi fraksi di DPR untuk menyinergiskan program pemberantasan korupsi di DPR. Ketua KPK Busyro Muqoddas kali ini mendatangi Fraksi Partai Hanura di DPR. Pertemuan ter-

sebut membahas keberadaan mafia anggaran di DPR berikut solusi untuk memberantasnya. Busyro menyebutkan, pemberantasan korupsi melalui mafia anggaran bisa dilakukan dengan membangun sistem yang terintegrasi.

"Kami beranjak dari gagasan. Bagikami ke depan yang lebih penting membangun sistem dengan siapa pun termasuk dengan DPR. Soal mafia anggaran juga kita cermati. Itu akan kita tegaskan dalam sistem yang sama-sama akan kita buat," ungkap dia saat diwawancarai wartawan di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Menurut Busyro, keberadaan mafia anggaran di DPR sudah menjadi fakta. Hal itu kemudian akan direspons dengan bagian sistem tata kelola dalam banyak hal, termasuk pengelolaan APBN dan APBD. Dia menegaskan, pengawasan terhadap pengelolaan APBN dan APBD akan dilakukan bersama-sama dengan DPR. Dengan demikian, pencegahan praktik mafia anggaran yang melibatkan pengelolaan keuangan APBN dan APBD tersebut bisa efektif.

"Selama ini belum ada ajakan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar). Yakalau nanti diajak tentu kami respons. Ada surat permintaan atau belum saya belum tahu. Jika memang diundang, nanti itu sinergis," kata dia.

Namun, dia menjelaskan, sebelum dengan Fraksi Partai Hanura, KPK sudah berkoordinasi dengan Fraksi PDIP, Gerindra, PKB, dan PKS. Jadi akan ada empat fraksi lagi di DPR yang akan pihaknya ajak

untuk berkoordinasi terkait masalah pemberantasan korupsi di lembaga legislatif itu. Tujuannya agar DPR bisa lebih mencerminkan sebagai lembaga yang menjadi aspirator masyarakat dalam konteks program-program yang bisa disinergiskan, khususnya di bidang pencegahan korupsi. Dia menyebutkan, sejauh ini fraksi-fraksi di DPR memberikan tanggapan yang baik terhadap kedatangan KPK ke DPR.

"Bagus sekali. Banyak *feedback* baik yang kami terima dari mereka. Kami sampaikan bagaimana pencegahan korupsi sebagai kewenangan program di KPK bisa melibatkan peran-peran dari DPR. Karena DPR salah satu fungsinya pengawasan dan legislasi. Nah, peran-peran itulah yang kemudian bisa kami sinergiskan," ucap dia.

Sementara itu, pengamat Charta Politik Yunarto Wijaya menilai Banggar tetap diperlukan dalam struktur DPR karena merupakan representasi dari fungsi anggaran. Walau muncul keluhan bahwa Banggar sebagai salah satu tempat atau lahan persekongkolan untuk korupsi, bukan berarti badan itu harus dibubarkan. "Banggar tetap diperlukan sebagai representasi fungsi anggaran," katanya di Jakarta kemarin. "Pembubaran Badan Anggaran justru akan memperumit diskusi pemerintah dan DPR dalam masalah anggaran," imbuhnya.

Menurut dia, persoalan terkait persekongkolan dan korupsi yang terjadi melalui Banggar dapat diselesaikan

dengan membuat aturan pengawasan yang jelas. Misalnya memasukan KPK dalam setiap rapat Banggar. Rapat Banggar pun juga harus terbuka dan tidak boleh tertutup. Tradisi rapat tertutuplah yang dapat memicu korupsi di Banggar. "Yang dilihat bagaimana tradisi rapat tertutup harus dirombak, selama ini hanya aturan tatib DPR yang diserahkan ke Banggar, rapat tertutup ini seringkali menjadi masalah," katanya.

Yunarto meyakini, dengan menempatkan KPK dalam setiap rapat Banggar, setidaknya akan mengurangi hasrat untuk melakukan korupsi. "Setidaknya ada semacam ketakutan secara psikologis meski tidak seluruhnya mampu menghapus atau menghilangkan korupsi, tapi saya yakin ini memiliki dampak yang besar," katanya.

Sebelumnya Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo melontarkan wacana pembubaran Banggar DPR. Namun, wacana ini langsung disangkal Pramono Anung yang menyatakan pembubaran Banggar tidak diperlukan karena Banggar adalah lembaga penyeimbang pemerintah dalam pengawasan dan pembahasan anggaran negara. "Tidak perlu dibubarkan. Lebih berbahaya kalau pemerintah tidak ada yang mengimbangi," kata Pramono.

Namun, dia mengakui Banggar memiliki banyak kelemahan. Dalam pelaksanaannya, Banggar sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang punya kewenangan.

● rahmat sahid/radi  
saputro/nurulhuda/ant

SEPUTAR INDONESIA

SABTU 17 SEPTEMBER 2011